

RELASI PERTAHANAN INDONESIA-INDIA ERA JOKOWI DAN *HEDGING* INDONESIA DALAM MENGHADAPI TIONGKOK

Alfin Febrian Basundoro¹

ABSTRAK

Kawasan Laut Tiongkok Selatan memanas dalam lima tahun belakangan, menyeret berbagai negara di Asia-Pasifik dalam konflik kekuatan secara geopolitik. Salah satunya, adalah tindakan provokatif Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berupa klaim kawasan perairan Natuna Utara. Praktis, dalam menghadapi tindakan demikian, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu bersikap strategis, termasuk dalam rangka meningkatkan ketahanan nasionalnya, terutama ketahanan maritim. Tidak hanya secara domestik dengan peningkatan peran dan efektivitas TNI, kerja sama dengan pihak eksternal juga menjadi pilihan. Peningkatan relasi pertahanan-keamanan dengan India menjadi salah satu opsi tindakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Peningkatan relasi pertahanan-keamanan RI-India tersebut merupakan bentuk implementasi konsep *hedging*, di mana Indonesia berupaya untuk mengambil keuntungan dari konflik Laut Tiongkok Selatan sekaligus menghindari konflik bersenjata yang lebih besar seiring dengan adanya relasi dengan kekuatan regional yang antagonis terhadap RRT. Dalam menganalisis peningkatan relasi tersebut, pendekatan kesetimbangan keamanan (*balance of threat*) karya Stephen Walt (1988) akan menjadi landasan teoritis dalam artikel ini. Kesimpulannya, bahwa upaya *hedging* Indonesia di Laut Tiongkok Selatan dengan meningkatkan relasi pertahanan-keamanan dengan India dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya penandatanganan kesepakatan dan latihan bersama.

Kata Kunci: Indonesia, India, Pertahanan, *Hedging*, Joko Widodo

¹ Penulis merupakan mahasiswa S1 tingkat akhir di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada dengan focus kajian politik dan keamanan global. Selain menjadi asisten pengajar dan peneliti di departemen, saat ini penulis aktif menjadi staf riset di Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Universitas Gadjah Mada. Alfinfebrian@mail.ugm.ac.id

Latar Belakang

Indonesia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo berfokus untuk menempatkan kedaulatan maritim sebagai fokus utama pertahanan dalam visi "Poros Maritim Dunia", tepatnya pada ajang KTT Asia Timur, bulan November 2014 (Santoso & Nafisah, 2017). Pertimbangan tersebut tentu sangat beralasan, mengingat luasnya wilayah maritim Indonesia mencapai lebih dari enam juta kilometer persegi dengan lebih dari 17.000 pulau (Witular, 2014). Praktis, dengan wilayah maritim tersebut, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa dan seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus menjadi bagian penting dari geostrategi Indonesia. Diplomasi maritim baik secara koersif maupun halus, dilaksanakan secara efektif dalam rangka mencapai visi tersebut.

Upaya Indonesia untuk mencapai kedaulatan maritim yang termaktub dalam visi Poros Maritim Dunia tersebut memperoleh tantangan, di antaranya adalah klaim RRT atas Laut Tiongkok Selatan yang kian agresif dalam lima tahun terakhir. Dalam klaim RRT tersebut, klaim RRT berpotongan dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna

Utara. Baru-baru ini, RRT kerap menggunakan kekuatan maritimnya, yakni kapal-kapal penjaga pantai untuk memprovokasi Indonesia sekaligus menegaskan klaimnya atas perairan tersebut (Oktavianti, 2020). Tentunya, perimbangan (*balancing*) dengan penguatan pertahanan maritim dilakukan oleh Indonesia demi tetap menjaga kedaulatan maritimnya di Natuna Utara. Namun, opsi tersebut terbentur dengan kondisi bahwa RRT sendiri merupakan salah satu kekuatan global baik secara militer maupun ekonomi, sehingga tindakan perimbangan kekuatan Indonesia tidak akan banyak berarti. Apalagi, Indonesia mengalami dilema relasi dengan RRT (Abrar & Syauqi, 2017), di mana kendati Indonesia terancam secara geopolitik oleh RRT terkait klaim maritim tersebut, namun Indonesia menikmati hubungan ekonomi dengan RRT (Ronodipuro, 2021), dengan nilai perdagangan mencapai US\$ 81,3 miliar (Observatory of Economic Complexity, 2018).

Praktis, tindakan *hedging* merupakan pilihan yang rasional untuk dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi RRT. Keuntungannya, Indonesia dapat menghindari dari konflik besar yang dapat

muncul dari reaksi negatif RRT, sementara Indonesia dapat mengambil keuntungan dengan tetap menegakkan kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan pada waktu yang bersamaan. Di antara aspek *hedging*, selain terdiri atas perimbangan kekuatan secara tidak langsung (*indirect balancing*) adalah perlibatan kekuatan regional sebagai penjamin stabilitas, karena memiliki daya tawar yang lebih tinggi (Kusumasomantri, 2018). Penguatan relasi antara Indonesia dengan India dalam sektor pertahanan dan keamanan pada era Joko Widodo ditenggarai menjadi implementasi dari strategi ini, di mana India merupakan kekuatan regional yang cukup signifikan dan dipandang mampu menangkal ekspansionisme RRT di Laut Tiongkok Selatan.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang akan dijawab dalam artikel ini yakni:

1. Mengapa Indonesia memilih India sebagai mitra kekuatan regional dalam melaksanakan *hedging*?
2. Bagaimana bentuk peningkatan relasi pertahanan India-Indonesia era Joko Widodo?

Metode Penelitian dan Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Sumber data yang menjadi acuan yakni buku-buku, atikel jurnal terdahulu, laporan, dan berita daring.

Dalam menjawab kedua rumusan masalah tersebut, dua pendekatan teoritis yang menjadi landasan adalah konsep *hedging* itu sendiri dan teori perimbangan ancaman (*balance of threat*). Menurut Evelyn Goh (dalam Wong, 2015), *hedging* sendiri didefinisikan sebagai strategi suatu negara untuk mempertahankan kepentingannya, sekaligus untuk menghindari konflik dengan negara yang lebih besar. Strategi ini diambil manakala suatu negara berada dalam situasi dilematis yang tidak memungkinkan untuk melakukan peningkatan efek penggentar (*deterrence effect*) secara optimal demi menangkal negara pengancam.

Sementara itu, teori perimbangan ancaman berargumen bahwa dua atau lebih negara akan lebih berpeluang untuk membangun aliansi manakala menghadapi ancaman bersama. Menurut Walt (1985), sejumlah hal yang menjadi alasannya adalah

(1) kedekatan ancaman yang harus dihadapi secara geografis; (2) kekuatan ofensif; dan (3) intensi ofensif. Dalam konteks ini, bahwa baik India maupun Indonesia, keduanya harus menghadapi ancaman yang sama, yakni RRT.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi peningkatan relasi Indonesia-India terkait dengan strategi *hedging* Indonesia dalam menghadapi RRT di Laut Tiongkok Selatan.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan akademik guna memperkaya studi ketahanan nasional, politik luar negeri, dan hubungan internasional di Indonesia, sekaligus untuk memberikan saran kepada pemangku kebijakan bidang terkait pada masa mendatang.

Pertimbangan Peningkatan Relasi Pertahanan RI-India Era Jokowi

Momen awal peningkatan relasi antara Indonesia dan India dalam bidang pertahanan pada era Presiden Joko Widodo adalah pada Mei 2018, ketika Perdana Menteri Narendra Modi mengunjungi

Jakarta. PM Modi dan Presiden Jokowi menandatangani kesepakatan terkait visi dan kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik, di mana dokumen tersebut juga mengandung poin kerja sama keamanan maritim (Sari dkk., 2018). Tak jarang, kapal angkatan laut kedua negara juga saling mengunjungi. Baru-baru ini, kedua negara juga menyepakati dilaksanakannya latihan militer yang lebih luas dengan melibatkan angkatan udara keduanya sebagaimana disampaikan oleh Dubes RI untuk India, Sidharto Suryodipuro (Rej, 2021).

Merujuk pada ancaman strategis bersama yang diterima kedua negara terkait dengan konsep *balance of threat*, keduanya jelas tengah menghadapi agresivitas RRT dalam bentuk yang bervariasi. Pertama, dari segi kedekatan geografis ancaman, baik Indonesia maupun India sama-sama merasakan kehadiran RRT “di depan pintu” masing-masing. Indonesia harus menghadapi RRT terkait dengan tindakan provokatifnya di Laut Tiongkok Selatan dan Perairan Natuna Utara, yang mana cukup dekat dengan wilayah Indonesia. Situasi terkini menunjukkan bahwa kapal Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) melakukan tindakan pengusiran sejumlah kapal penjaga pantai RRT di Perairan Natuna Utara

(Yuniar, 2021). Di sisi lain, India juga harus menghadapi tindakan provokatif RRT di perbatasan kedua negara dalam lima tahun belakangan, salah satu yang terbaru adalah di beberapa titik Garis Kontrol Aktual yang memanas sejak bulan Mei 2020 lalu (Karackattu, 2020). Meskipun ada perbedaan dari segi kedua, yakni kekuatan ofensif, di mana Indonesia secara langsung hanya menghadapi tindakan provokatif RRT dalam bentuk pengerahan pasukan paramiliter (penjaga pantai) sementara India menghadapi RRT dalam bentuk militer. Namun, intensi ofensif yang dihadapi kedua negara sama, yakni upaya RRT untuk menduduki sebagian wilayah dari keduanya dengan basis klaim tertentu.

Adapun apabila dianalisis menggunakan konsep *hedging*, terdapat beberapa pertimbangan peningkatan relasi pertahanan antara kedua negara tersebut. Pertama, pengambilan tindakan *hedging* mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk bersikap hati-hati dalam menghadapi negara pengancam, dalam konteks ini adalah RRT. Pendekatan intensif atau pembentukan

aliansi (*bandwagoning*)² dengan kekuatan global yang paling *getol* melawan RRT yakni Amerika Serikat (AS), tidak dimungkinkan karena akan memantik reaksi negatif dari RRT, di antaranya adalah pemutusan hubungan ekonomi dan yang lebih dikhawatirkan, adalah agresi militer. Apalagi, status Indonesia merupakan salah satu negara utama di ASEAN yang selama ini kerap “bermain dua kaki” di antara dua kekuatan global, yaitu RRT dan AS, guna mempertahankan eksistensinya dan mengambil keuntungan geopolitik berupa daya tawar. Praktis, India menjadi salah satu alternatif negara yang dapat dijadikan mitra strategis bagi Indonesia.

Kedua, India sendiri merupakan salah satu kekuatan regional di Asia dengan kapabilitas pertahanan yang sangat memadai. Sebagaimana analisis International Institute of Strategic Studies (IISS) dalam *Military Balance* (2020), India belakangan tengah gencar mengembangkan angkatan lautnya, seiring dengan peningkatan prioritas kedaulatan Samudra Hindia dalam politik luar negeri

mampu menghadapi kekuatan lawan, yakni RRT.

² Menurut Walt (dalam Wong, 2015), aliansi seringkali dibentuk oleh negara yang lebih lemah—dalam konteks ini adalah Indonesia—dengan negara yang lebih kuat (AS) agar lebih

India. Di antaranya, adalah pembangunan kapal induk *INS Vikrant*, kapal selam balistik *INS Arihant*, dan sejumlah kapal perang lainnya, didukung dengan anggaran militer yang masif—mencapai lebih dari US\$ 70 miliar (IISS, 2020). Dengan menjalin relasi yang lebih kuat dengan India, Indonesia dapat memperoleh daya tawar yang lebih tinggi secara geopolitik, diibaratkan bahwa India menjadi “backing” Indonesia dalam menghadapi RRT, baik secara ofensif (unjuk kekuatan militer) maupun diplomasi (dalam perundingan multilateral). Harapannya, RRT akan mempertimbangkan ulang untuk bersikap provokatif terhadap Indonesia. Selain itu, peningkatan relasi RI-India dalam kerangka *hedging* tidak diarahkan untuk membentuk suatu aliansi yang terinstitusionalisasi yang pada akhirnya, berpotensi berujung pada bentuk *bandwagoning*, melainkan hanya pada tahapan pembentukan kesepakatan bersama terkait problematika strategis tertentu yang harus dihadapi bersama.

Ketiga, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memperoleh momentum untuk mendekatkan diri secara strategis kepada India, dengan kepemimpinan Indonesia di Indian Ocean Rim Association (IORA) periode 2015-2017

(Kementerian Luar Negeri, 2019). Politik luar negeri Indonesia era Joko Widodo yang cenderung tegas dan otonom (Madu, 2018) mendorong Indonesia untuk berusaha untuk mengambil setiap peluang guna memenuhi kepentingan nasionalnya, termasuk terkait relasi pertahanan-keamanan dengan India. Praktis, dialog dan kerja sama strategis dengan India akan mengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan India sebagai salah satu kekuatan utama di IORA. Selain itu, posisi IORA yang dalam perkembangannya menjadi “penyeimbang” bagi pengaruh RRT di Asia-Pasifik secara geopolitik dan geoekonomi turut mendukung strategi *hedging* Indonesia, meskipun pada dasarnya organisasi tersebut lebih berfokus pada kesepakatan perdagangan dan kerja sama ekonomi (Madu, 2018).

Bentuk Konkret Kerja Sama Pertahanan-Keamanan Indonesia-India era Presiden Joko Widodo

Dengan disepakatinya dokumen visi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dan India telah melaksanakan sejumlah kegiatan bersama dalam sektor pertahanan dan keamanan di kawasan maritim Indo-Pasifik. Pertama, adalah Forum Dwitahunan Menteri Pertahanan (*Biennale*

Defense Minister Forum). Kendati pertemuan ini telah dilaksanakan sejak 2012 pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, namun sejak pertemuan tahun 2018, isu keamanan maritim regional menjadi fokus utamanya (Sari dkk., 2018).

Selain dalam bentuk pertemuan tingkat tinggi bilateral, Indonesia dan India meningkatkan intensitas latihan militer. Pertama, latihan militer dalam lingkup India-Indonesia *Coordinated Patrol* (CORPAT) guna mengamankan jalur pelayaran di sekitar Samudra Hindia (Sari dkk., 2018). Latihan tersebut berwujud patroli laut, di mana angkatan laut kedua negara menerjunkan kapal-kapal perang masing-masing. Tidak hanya bertujuan untuk memastikan keamanan pelayaran di kawasan Samudra Hindia, kegiatan patroli bersama tersebut juga meningkatkan kehadiran militer masing-masing di kawasan Indo-Pasifik yang secara tidak langsung menjadi efek penggentar tersendiri (Singh, 2018). Kedua, adalah latihan militer rutin tahunan yang telah dinyatakan sebelumnya, yakni *Samudra Shakti* yang dilaksanakan setiap bulan November. Kedua latihan tersebut menjadi bentuk implementasi komprehensif bagi kerja sama pertahanan-keamanan kedua negara.

Kesimpulan

Kerja sama pertahanan-keamanan antara Indonesia dan India mengalami peningkatan yang signifikan pada era pemerintahan Joko Widodo. Tujuan utama dari peningkatan ini adalah sebagai bentuk strategi *hedging* yang diimplementasikan Indonesia dalam menghadapi provokasi RRT yang juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Indonesia dengan pertimbangan kekuatan militer dan ekonominya, mengimplementasikan strategi ini untuk menghadapi negara dengan kekuatan yang jauh lebih masif seperti RRT. Tentunya, Indonesia membutuhkan mitra strategis dengan kekuatan yang lebih besar, salah satunya adalah India. Di sisi lain, India pula juga harus menghadapi negara lawan yang sama yaitu RRT. Praktis, relasi keduanya berjalan dalam payung perimbangan ancaman (*Balance of Threat*), di mana kedua negara dengan musuh strategis yang sama akan cenderung membentuk aliansi atau relasi strategis. Peningkatan relasi dengan India membawa banyak keuntungan, di antaranya Indonesia memperoleh daya tawar yang lebih tinggi, peningkatan efek penggentar, dan reaksi

negatif dari RRT dapat diminimalisasi. Bentuk implementasi peningkatan relasi pertahanan dengan India bervariasi, tidak hanya secara legal-formal dengan

penandatanganan aneka kesepakatan, namun juga berwujud latihan militer dan patroli Bersama.

Daftar Pustaka

- Abrar, M.I., Syauqi, M.D. 2017. Hedging Sebagai Strategi Indonesia untuk Menghadapi Klaim Cina di Laut Cina Selatan. *Indonesian Foreign Policy Review* (4): 1-18.
- Singh, U.B. 2018. Emerging India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. *Journal of Defence Studies* 12(3): 79-86.
- Karackattu, J.T. 2020. THE CORROSIVE COMPROMISE OF THE SINO-INDIAN BORDER MANAGEMENT FRAMEWORK: FROM DOKLAM TO GALWAN. *Asian Affairs* 51(3): 590-604.
- Kusumasomantri, A.R. 2018. Strategi Hedging Indonesia terhadap Klaim Teritorial Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. *Global: Jurnal Politik Internasional* 17(1): 48-80.
- Walt, S.M. 1985. Alliance Formation and the Balance of World Power. *International Security* 9(4): 3-43.
- Madu, L. 2018. Urgensi Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam Diplomasi Maritim Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies* 2(2): 171-187.
- Observatory of Economic Complexity. 2018. <https://oec.world/en/profile/country/idn>. 5 Februari 2021 (11:45).
- Oktavianti, T.I. 2020. Bakamla drives Chinese coast guard vessel off North Natuna waters. The Jakarta Post <https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/13/bakamla-drives-chinese-coast-guard-vessel-off-north-natuna-waters.html>. 14 Februari 2021 (8:05).
- Rej, A. 2021. India and Indonesia Push Ahead with Defense Relationship. The Diplomat <https://thediplomat.com/2021/01/india-and-indonesia-push-ahead-with-defense-relationship/>. 14 Februari 2021 (8:07).
- Ronodipuro, R. 2021. The Dilemma in Sino-Indonesian Cooperation. Modern Diplomacy <https://moderndiplomacy.eu/2021/01/31/dilemma-sino-indonesian-cooperation/>. 5 Februari 2021 (10:39).



- Santoso, D. Nafisah, F. 2017. Indonesia's Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations. *Jurnal Hubungan Internasional* 10(2): 191-203. Sari. M.I. Hutabarat, L.F., Octavian, A. 2018. Indonesia-India Defense Diplomacy in the Indian Ocean. *Jurnal Pertahanan* 4(2): 77-88.
- The International Institute for Strategic Studies (ed.). 2020. *The Military Balance*. Routledge. London.
- Wong, Anthony M. 2015. Shifting Policy Postures of Indonesia and Thailand: Responding to the China Challenge. *Naval Postgraduate School*.
- Yuniar, R.W. 2021. Indonesia flags unease over Beijing's South China Sea actions. South China Morning Post <https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3120780/indonesia-flags-unease-over-beijings-south-china-sea-actions>. 14 Februari 2021 (8:04).